



INPRES NO. 10 TAHUN 2016

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

OUTLINE PAPARAN

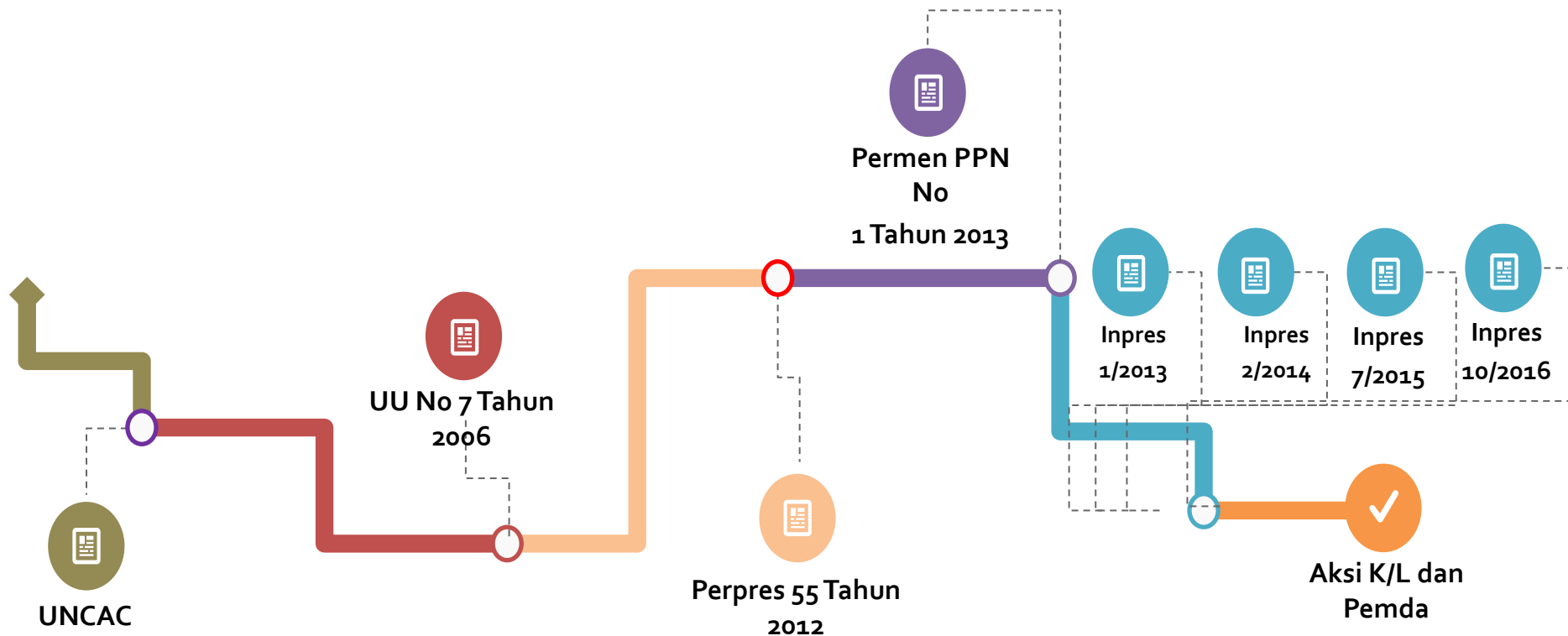
PENDAHULUAN

INPRES NO. 10 TAHUN 2016

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN



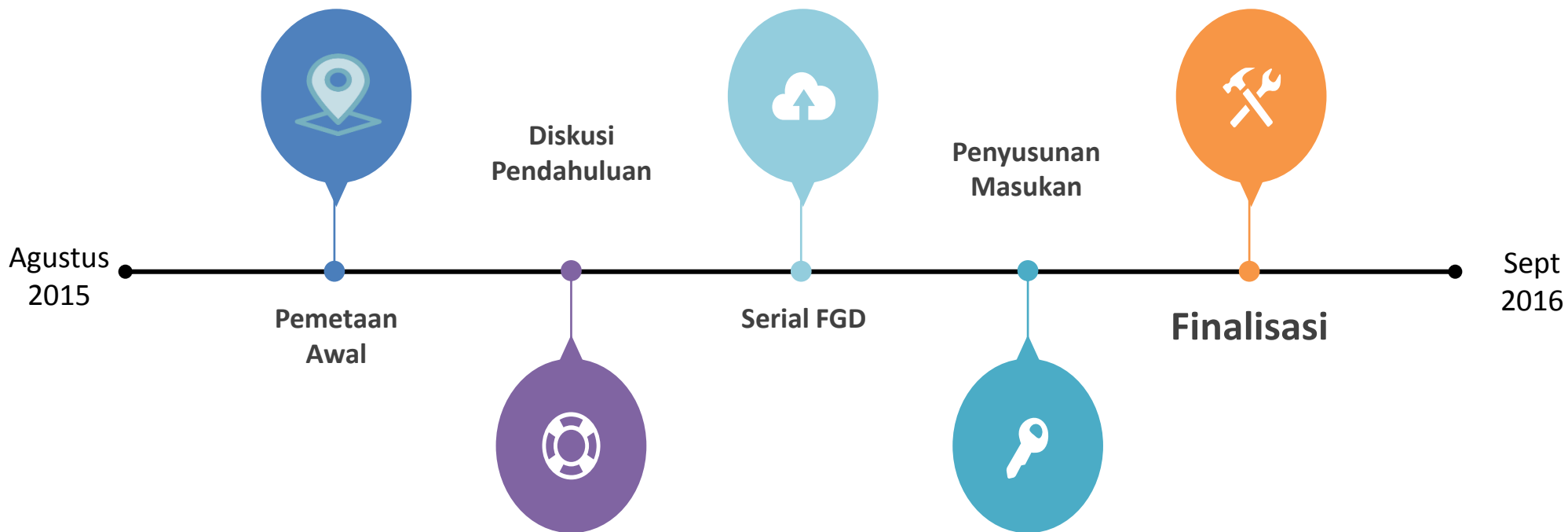
LATAR BELAKANG



- Indonesia meratifikasi konvensi PPB anti korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) melalui UU No. 7 Tahun 2006.
- Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 (**Jangka Menengah 2012-2014, Jangka Panjang 2012-2025**).
- Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda.
- Sebagai pedoman koordinasi, pemantauan dan evaluasi, disusun Permen PPN No. 1 Tahun 2013.



PENYUSUNAN AKSI PPK TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017



Dalam diskusi penyusunan Aksi PPK 2016, KPK selalu dilibatkan. KPK telah menyampaikan masukan secara resmi dan telah ada pembahasan antara Bappenas dengan Tim KPK

- Pemetaan Awal dilakukan berdasarkan prioritas dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 termasuk melakukan evaluasi terhadap Aksi PPK
- Bappenas menyampaikan surat kepada K/L untuk masukan Aksi PPK 2016
- Setelah mendapat arahan mengenai prioritas aksi, dilakukan serial FGD yang melibatkan K/L, CSO, Organisasi Profesi
- Berdasarkan masukan dari FGD, disusun kembali isu-isu yang dapat dijadikan aksi
- Draft Aksi disampaikan kepada K/L untuk memperoleh tanggapan
- Masukan berbagai pihak, diskusi dengan KPK, KSP, persiapan dengan Setkab dan Setneg dilakukan dalam rangka finalisasi
- Pembahasan Draft Final bersama KSP dan KPK melalui rangkaian pertemuan



ARAHAN BAPAK PRESIDEN PADA SAAT RATAS INPRES NO. 10 TAHUN 2016

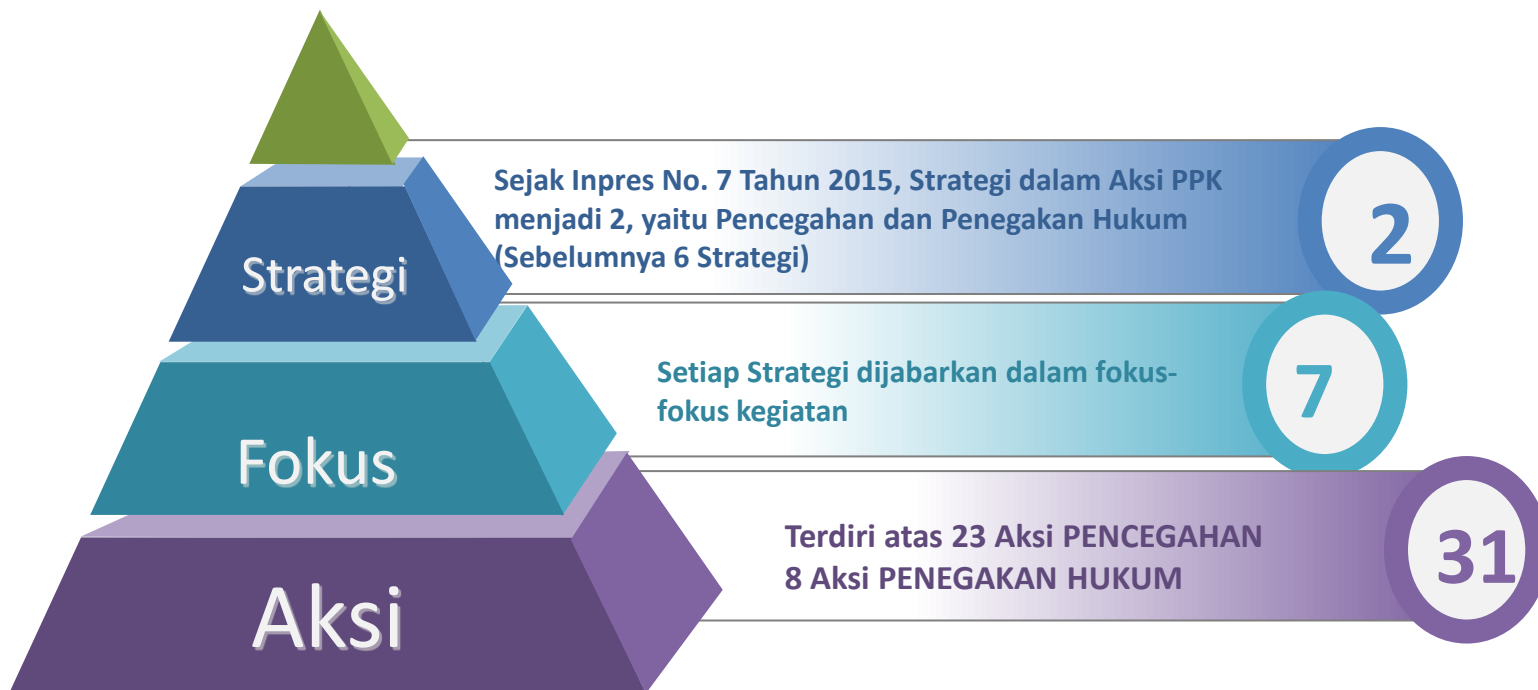
22 NOV 2016



- *aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada dokumen-dokumen perencanaan yang bertumpuk-tumpuk - agar aksi ini betul-betul fokus, betul-betul konkret di lapangan.*
 - *jangkauan pemberantasan korupsi harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas.*
 - *Terkait dengan aksi pencegahan, diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat,*
-
- *pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara, terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan*
 - *prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial, serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa.*
 - *mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing kementerian dan lembaga, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui keterbukaan informasi*
 - *mendukung dan memperkuat KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran.*
 - *Reformasi internal di institusi Kejaksaan dan Kepolisian juga harus terus berjalan untuk menghasilkan penegakan hukum yang profesional.*
 - *Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK*



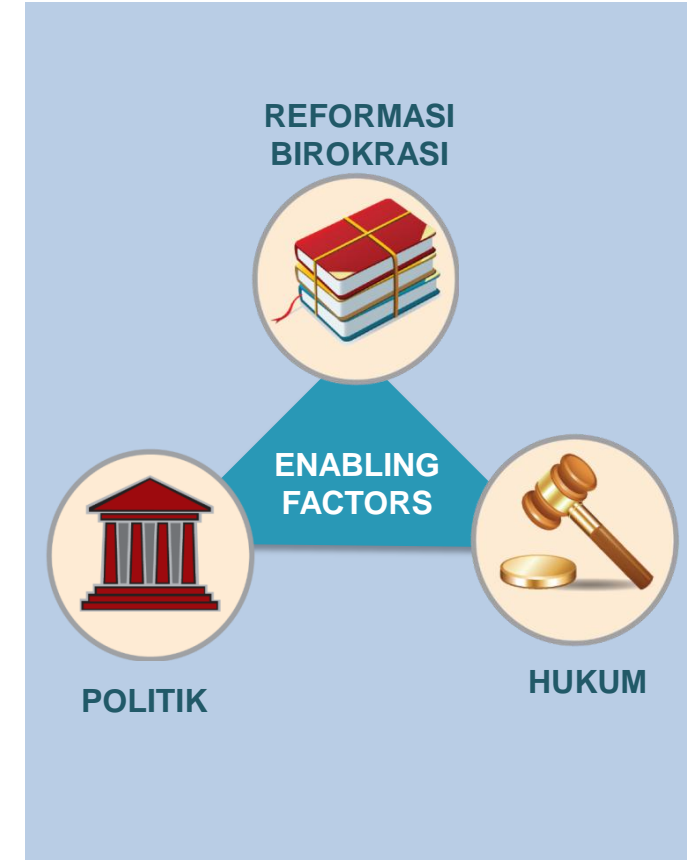
INPRES NO. 10 TAHUN 2016 – AKSI PPK TAHUN 2016 DAN 2017



Inpres dirancang untuk **mengawal program prioritas Pemerintah**, memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2011-2015, dengan memastikan keterkaitan dan penekanan aksi untuk pencapaian *outcome*, peningkatan kinerja *core business* K/L yang sejalan dengan prioritas Presiden.



FOKUS SEKTOR AKSI PPK 2016 DAN 2017





Latar Belakang Aksi PBJ

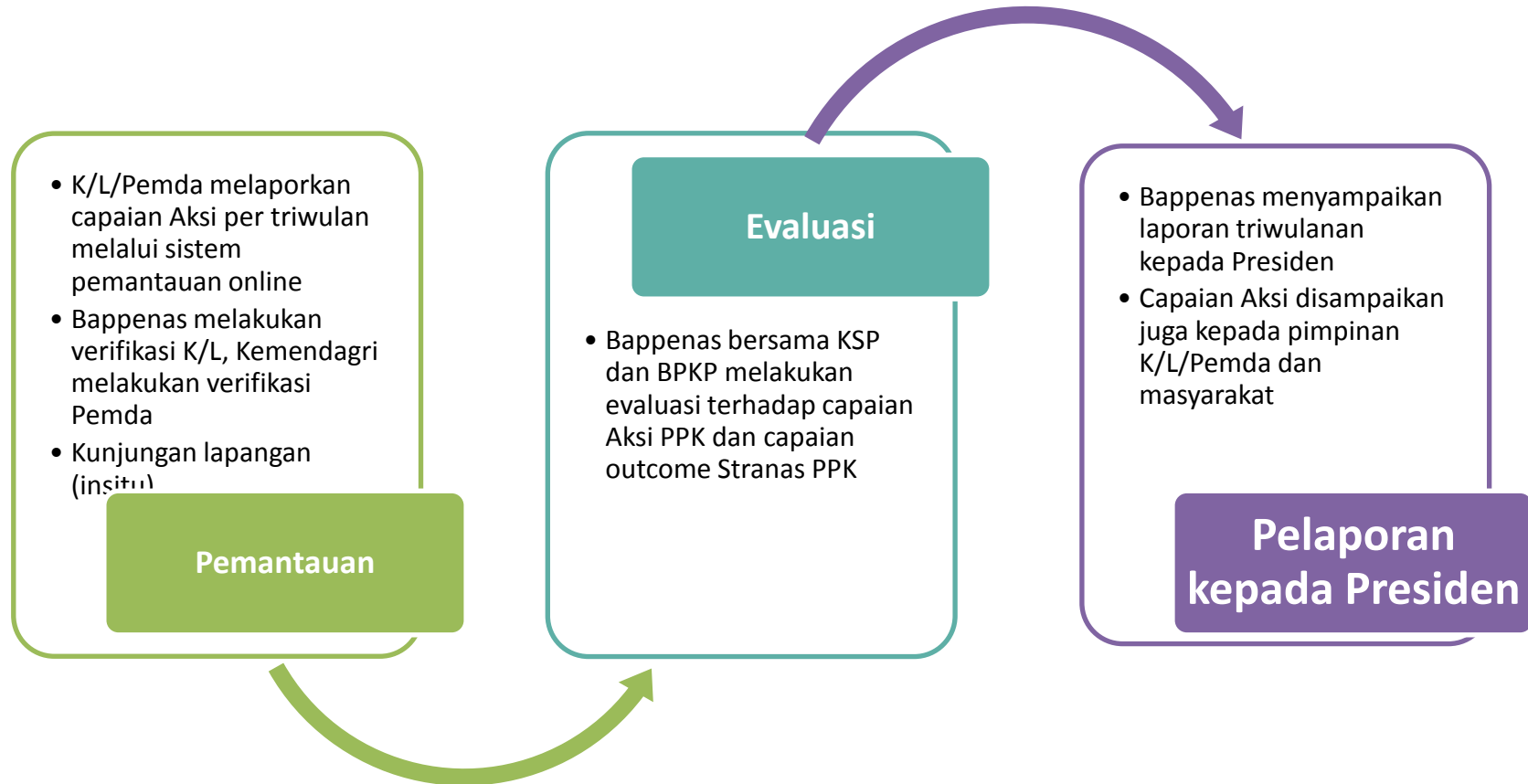
Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (OECD, 2007: 9)

Mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK (2012: 72) (2013: 83) (2014: 41); sejak tahun 2004-2014, KPK telah menangani 411 kasus korupsi yang 131 atau sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa

Dalam konteks PBJ, pendekatan yang represif justru membuat aparaturnya Negara takut untuk terlibat di dalam kegiatan pengadaan, sehingga mereka berupaya untuk membuat diri mereka tidak eligible untuk dipilih sebagai pihak yang terlibat di pengadaan dengan cara menggagalkan diri mereka dalam tes nasional (Suaramerdeka, 08/07/2014)

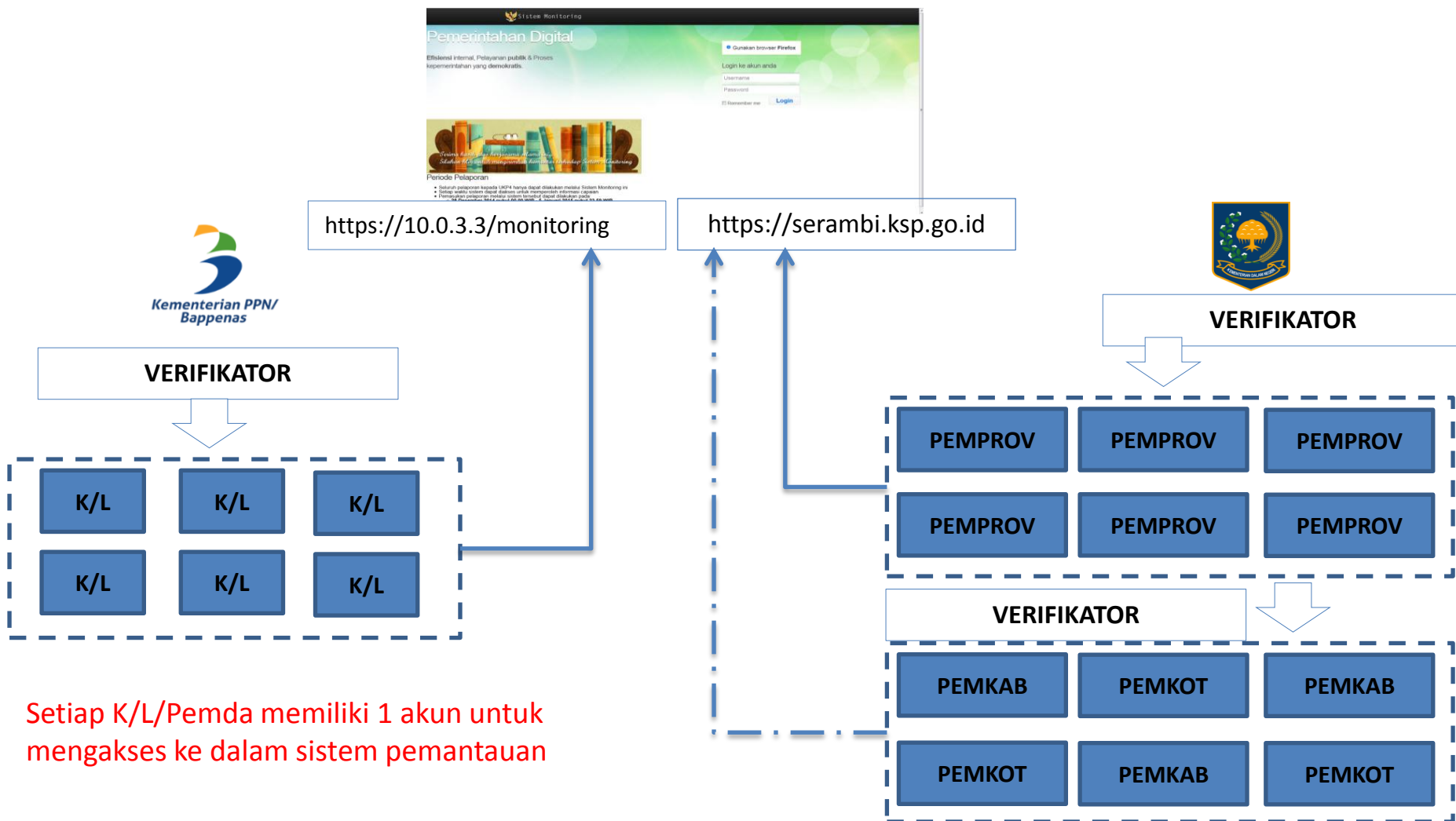
Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah mengarahkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, termasuk dalam aksi PBJ

PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN



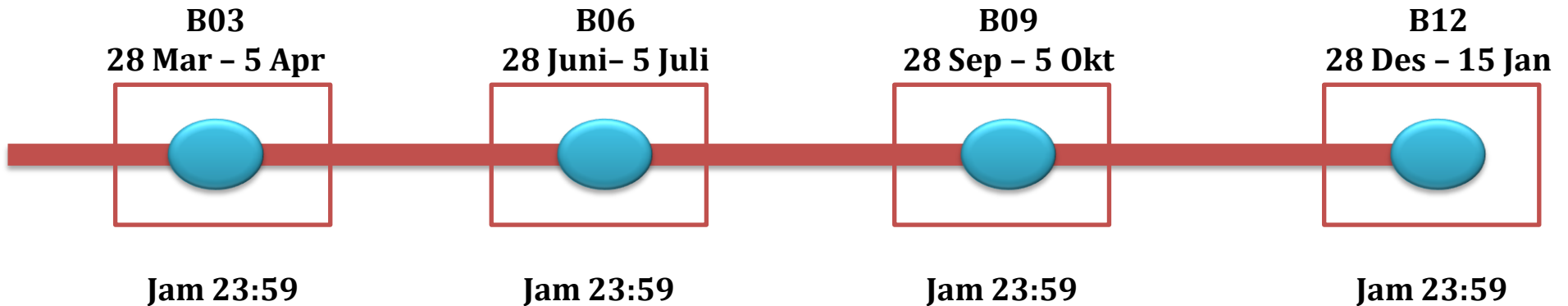


SISTEM PEMANTAUAN *ONLINE*



CHECKPOINT PEMANTAUAN

Awalnya direncanakan pelaporan akan dimulai pada B12 (2016), namun karena rentang waktu yang sudah sangat dekat, maka pelaporan akan dimulai pada B03 (2017)



1. Pelaporan dilakukan melalui Sistem Pemantauan *online*. Tidak menerima laporan melalui surel (e-mail) ataupun surat lainnya.
2. Periode pelaporan adalah mulai tanggal **28** pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal **5** pukul 23:59 WIB. Laporan di luar waktu yang disebutkan tidak dapat difasilitasi oleh sistem.
3. Sistem hanya dapat menerima laporan persentase capaian apabila disertai dengan data dukung yang diunggah (upload) ke dalam sistem tersebut.
4. Setelah pelaporan berakhir, akan dilaksanakan verifikasi berdasarkan klaim capaian dan data dukung yang dimasukkan ke dalam Sistem Pemantauan *online* untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden.

F8K Pengadaan Barang dan Jasa

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)	% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)	B03 - Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP - Adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) di Unit Kerja/SKPD		B03 Laporan Daftar Program Prioritas terpilih (Lampiran 1.1), SK Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) - Profil Keanggotaan Pokja ULP (Lampiran 1.2) - Profil PP di Unit Kerja/SKPD (Lampiran 1.3)
						B06 - Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 - Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP		B06 Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Lampiran 2.1) Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP (Lampiran 2.2)

F8K Pengadaan Barang dan Jasa

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)	% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)	B09 <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 - Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja/SKPD 		B09 Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Lampiran 3.1) Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di Unit Kerja/SKPD (Lampiran 3.2)
						B12 <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03- - Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016– 2017 - Adanya hasil akumulasi perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan Unit Kerja/SKPD - Adanya perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP penuh waktu sesuai dengan beban kerja 		B12 Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Lampiran 4.1). Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017 (Lampiran 4.2). Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ secara menyeluruh di ULP dan Unit Kerja/SKPD (Lampiran 4.3).Dokumen perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP (Lampiran 4.4)

DATA DUKUNG

JENIS DATA PENDUKUNG YANG DAPAT DISAMPAIKAN UNTUK MENDUKUNG KLAIM CAPAIAN AKSI PPK PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA

Dalam melakukan melaporkan capaian tiap kegiatan dalam suatu aksi, insitansi pelapor pada dasarnya harus menyertakan bukti pendukung yang dapat meyakinkan masyarakat luas (secara sederhana namun jelas) bahwa kegiatan yang dimaksud memang dilaksanakan sesuai klaim.

Beberapa Contoh Kegiatan dalam Aksi PPK

Rapat koordinasi, penyuluhan, sosialisasi, dsb.

Studi/kajian, pengumpulan data, verifikasi data, dsb.

Pembuatan draft peraturan, rencana induk, draft akademis, dsb.

Penerbitan izin, surat keputusan, peraturan, dsb.

Lelang, penunjukan kontraktor, dsb.

Pekerjaan lapangan, konstruksi bangunan, dsb.

Penyerahan bantuan sosial, beasiswa, raskin, alat kesehatan, dsb.

Jenis Data Pendukung yang disampaikan (di-upload) diantaranya dapat Berupa:

Notulensi, daftar hadir, foto kegiatan yang dimaksud, materi yang disampaikan.

Copy/scan hasil studi atau kajian yang dimaksud, list data yang dikumpulkan, foto/dokumentasi kegiatan.

Copy/scan dari dokumen yang dimaksud.

Izin, keputusan, peraturan dimaksud yang sudah ditandatangani pejabat berwenang

Sampel bukti proses lelang, pengumuman pemenang lelang, bukti keputusan pengumuman.

Foto kegiatan dan koordinat bangunan, laporan perkembangan dari manajer proyek, dsb.

Daftar penerima bantuan dan alamat/koordinatnya, foto kegiatan, dsb.



TERIMA KASIH